



# Newsletter Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

VOLUME 11 NO 118

BULAN NOVEMBER 2014

**Tim Redaksi :****Pelindung :**

Ir. M. Tassim Billah, MSc

**Penasehat :**

Agus Sunarya, SE, MM

Ir. Budi Waryanto, MSI

Ir. Bayu Mulyana, MM

Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM

**Penanggung Jawab :**

A. Prasetyanto Wibowo, SH

**Redaksi :**

Dedi Triyono

**Editor :**

Eko Nugroho, S.Kom, MM

Dra. P.Hanny Muliyan, MM

Dra. Laelatul Hasanah, MSI

Dian Prasetyorini, SE

**Redaktur Pelaksana :**

Evita Wahyu Puspitasari, S.Kom

**Sekretariat :**

Marwati

Agus

Suparmi

Redaksi menerima tulisan  
maupun saran dan kritik untuk  
Newsletter Pusdatin

Kirimkan ke alamat redaksi :  
Pusat Data dan Sistem Informasi  
Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3

Gd. D Lantai IV

Pasar Minggu – Jakarta 12550

Telp : 021-7805305, 7816384

Fax : 021-7822638

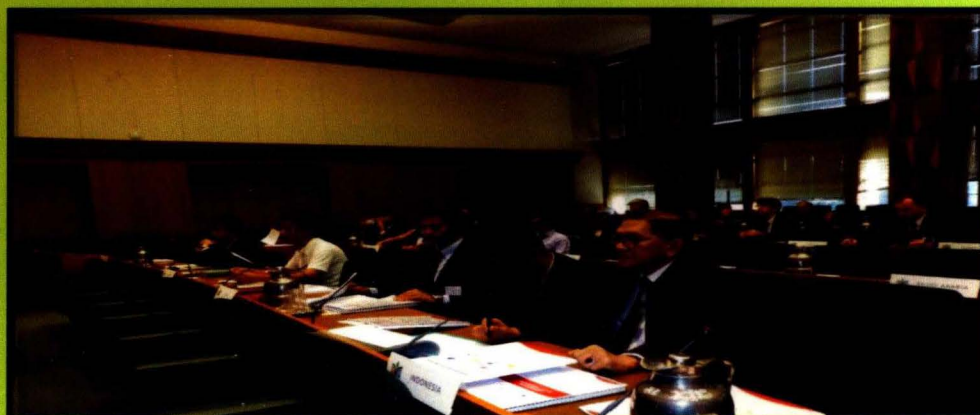
e-mail :

newsletter@pertanian.go.id

**Daftar Isi :**

- Agricultural Market Information System (AMIS) Global Food Market Information...(1)
- Bimbingan Teknis Cyber Extension Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan...(3)
- Pelaksanaan Implementasi dan Pengawasan e-Form Peternakan Di Provinsi DKI Jakarta...(6)
- Standarisasi LPSE Kementerian dan Lembaga Oleh LKPP...(9)

## AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM (AMIS) GLOBAL FOOD MARKET INFORMATION



Menghadiri Sidang AMIS sesi ke-6  
di Gedung FAO Roma - Italia

Judul pertemuan tersebut adalah "AMIS Global Food Market Information Grup Sesi ke-6". Sidang ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 9 - 10 Oktober 2014. Sidang ini berlangsung di Kantor Pusat FAO, ruangan Green Room, Roma – Italia. Sidang dipimpin oleh Sekretaris AMIS, yaitu Abdolreza Abbasian, sedangkan sebagai moderator adalah Ian Mitchell – Inggris.

Peserta yang hadir dalam sidang tersebut adalah negara-negara anggota AMIS meliputi : Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Mesir, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Indonesia, Italia, Jepang, Mexico, Federasi Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Spanyol , Thailand , Turki , Ukraine , Inggris dan Amerika Serikat. Disamping itu hadir pula wakil dari Sekretariat AMIS, wakil dari FAO, wakil dari International Forestry Resources and Institution (IFRI), wakil dari International Grain Council (IGC), wakil dari Organization For Economic Cooperation and

Development (OECD), wakil dari United Nation Conference On Trade On Development International (UNCTAD), wakil dari WFP dan wakil dari World Bank.

Agenda sidang yang pertama adalah pidato pembukaan dan sambutan. Mr. Graziano da Silva, Direktur Jenderal FAO, membuka pertemuan AMIS dan memuji AMIS sebagai salah satu inisiatif yang paling sukses. Sambutan yang pertama dari Karen Scheineder, Direktur Biro Pertanian dan Sumberdaya Ekonomi Australia (ABARES), menyoroti kemajuan di pemerintahan Australia, selama menjabat sebagai AMIS chair. Sambutan kedua dari Ian Mitchell, Deputi Direktur dan Penasehat Ekonomi Senior, Departemen Lingkungan, Pangan dan Pedesaan (DEFRA), Inggris, menguraikan prioritas sebagai ketua untuk meningkatkan kualitas data stok. Pada kesempatan ini juga menyoroti perlunya Country Focal Point (CFP) untuk

## Lanjutan Berita AMIS Global Food Market Information...



mengidentifikasi masalah untuk dukungan AMIS di semua tingkatan termasuk pada tingkat menteri.

Agenda sidang yang kedua adalah pembahasan Outlook dan Situasi Pemasaran berdasarkan Data AMIS. Untuk pertama kalinya pada pertemuan AMIS ini dilakukan diskusi interaktif dengan membagi negara - negara peserta menjadi beberapa grup menurut komoditas. Indonesia dimasukkan ke kelompok grup komoditas beras, karena produksi cukup tinggi dan beras merupakan makanan pokok. Masing - masing negara peserta diminta menjelaskan situasi global, tantangan dan prospek bagi komoditas yang tercakup dalam AMIS (padi, jagung, kedelai dan gandum). Prospek ketersediaan (suplai) dianggap positif untuk semua komoditas AMIS. Perhitungan atau model stok akan dibangun pada pertemuan berikutnya. Umpan balik untuk sesi ini sangat positif. Negara - negara peserta didorong untuk menginformasikan kepada Sekretariat AMIS tentang cara mengefektifkan pertemuan ini kedepan, dan grup telah memutuskan untuk menggunakan format ini untuk pertemuan mendatang.

Agenda selanjutnya adalah laporan AMIS periode Mei - Oktober 2014. Menyoroti pencapaian selama periode Mei - Oktober 2014 untuk memberikan gambaran kegiatan yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan output AMIS Informasi pengumpulan, Penelitian, Pengembangan kapasitas, Desiminasi dan Dialog kebijakan. Khusus untuk pengembangan kapasitas, Sekretariat akan mempersentasikan perkembangan aktivitas di negara - negara yang menjadi target proyek bantuan/hibah : India, Nigeria, Filipina dan Thailand. Pada kesempatan ini juga dilaunching *Food Price Monitoring and Analysis (FPMA)*. Negara-

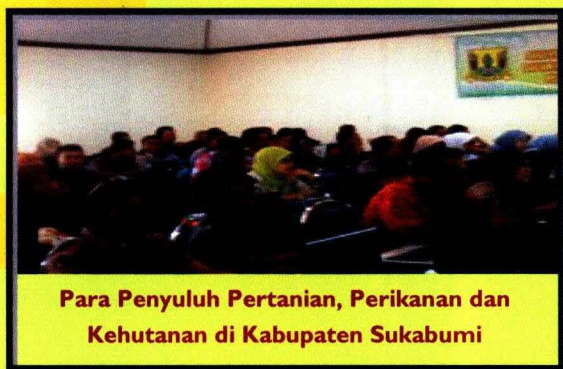
negara anggota menyambut baik pencapaian laporan pada periode ini. Pada kesempatan ini juga diinformasikan tentang rencana pertemuan/workshop tenaga ahli stok pada tanggal 21 November 2014 di London, dan negara anggota diminta mengirimkan expert dalam perhitungan stok, untuk hadir pada seminar sehari tersebut. Informasi lebih lanjut, termasuk agenda, akan disampaikan ke negara anggota pada akhir Oktober 2014.

Agenda berikutnya membahas Evaluasi Laporan Kemajuan AMIS. Susie Miller, mempresentasikan evaluasi pekerjaan penyusunan lembar kerja AMIS, menyoroti bahwa kerangka tersebut harus mencakup tujuan AMIS yang lebih luas, termasuk transparansi pasar. Pendekatan harus logis, dan tidak tumpang tindih dengan pekerjaan lain, mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna maupun pemangku kepentingan. Tahap selanjutnya termasuk menyusun lembar kerja grup pada Januari tahun depan. Proposal evaluasi lembar kerja ini akan dipresentasikan pada rapat berikutnya.

Agenda selanjutnya adalah membahas Peramalan dan *Remote Sensing*. Topik ini dipresentasikan oleh peserta dari Australia, Kanada, Uni Eropa, USA dan GEOGLAM. Presenter menjelaskan informasi tentang bagaimana *remote sensing* digunakan untuk meramal pertanian. Pada saat ini, *remote sensing* (penginderaan jauh) terutama digunakan untuk peramalan secara kualitatif, sementara metode tradisional pendekatan menggunakan metode peramalan kuantitatif. Transisi diperlukan untuk indikator yang lebih kuantitatif. Pentingnya penginderaan jauh dan kebutuhan informasi umpan balik dari pengguna, serta dikombinasikan dengan informasi lain seperti informasi agronomi dan cuaca juga disorot.

Sekretariat AMIS memuji kerja yang baik untuk Global Agricultural Monitoring Initiative (GEOGLAM) dan memberikan kesempatan bagi anggota AMIS memberikan umpan balik untuk pengembangan kerjasama lebih lanjut. Laporan oleh GEOGLAM akan dipresentasikan pada pertemuan IG berikutnya dengan focus kemajuan monitor pertanian termasuk didalamnya indikator kuantitatif. (☞ Chafid)

# BIMBINGAN TEKNIS CYBER EXTENSION BAGI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN



Para Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Sukabumi

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Para Penyuluh mutlak perlu dilakukan. Karena dengan terus berkembangnya informasi dan teknologi pertanian yang semakin meningkat perlu diimbangi dengan tingkat kualitas SDM penyuluh yang ada, agar pelaksanaan tugas penyuluh dapat mengatasi permasalahan - permasalahan yang timbul di lapangan.

Melalui Bimtek CybEx bagi penyuluh yang dilaksanakan di BP4K Kabupaten Sukabumi, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan, dengan demikian terjadi peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Sukabumi.

Pusdatin yang mendapat undangan kapasitas sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait dengan Aplikasi Multimedia, yang merupakan satu diantara materi pada Bimbingan Teknis Cyber Extension yang diselenggarakan BP4K Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, materi bahasan terkait dengan Website dan Aplikasi Multimedia dengan isi materi diantaranya adalah;

- Manipulasi Gambar/Objek dengan menggunakan piranti Lunak Adobe Photoshop (pendalaman),
- Pengenalan Dasar Pembuatan Video,
- Pengenalan Dasar Pembuatan Video (Adobe Premier Pro),
- Pra Produksi Pembuatan Video,
- Produksi Pembuatan Video,
- Latihan Produksi Pembuatan Video,
- Lanjutan Produksi Pembuatan Video (Pasca Produksi),

- Editing Video dengan Adobe Premier Pro,
- Latihan Editing Video dengan Adobe Premier Pro,
- Distribusi/Convert.

Penyampaian materi tersebut di atas adalah guna menghantarkan penyusunan bahan penyuluhan yang biasa dilakukan oleh para penyuluh, dikemas dan disajikan dalam bentuk rekaman video melalui situs web sehingga dapat diakses oleh berbagai pihak terutama ditujukan bagi penyuluh, petani atau pelaku usahatani (agribisnis). Acara ini diikuti oleh para Penyuluh dan Admin CybEx yang berasal dari BPP atau BK3K Sebanyak 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi TAHUN 2014.

Pada kesempatan ini, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian menugaskan tiga orang petugas untuk hadir dalam acara bimtek ini. Petugas Pusdatin yang terlibat dan ditugaskan adalah Fungsional Pranata Komputer pada Aplikasi Multimedia adalah Andry Polos, S.Kom, MM, Masnudi Astho, SP dan Lukmanul Hakim.

Diperkirakan dengan penyelenggaraan CybEx seperti ini, diharapkan mampu menciptakan Penyuluh yang dapat memahami paradigma baru sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis TI (Teknologi Informasi), mampu membuat, mengedit dan mengirim artikel bahan website CybEx, ePetani dan Website BP4K Kabupaten, mampu mengelola sistem e-Infomasi dan e-Laporan, memahami tugas pokok dan fungsi petugas admin tingkat Kabupaten, Bidang dan Kecamatan/BP3K dengan profesional dan handal. Semoga kegiatan Bimtek CybEx memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan pembangunan informasi teknologi pertanian yang sudah lama dirintis, semangat dan kemajuan keterbukaan informasinya cukup terasa sejak tahun 2010 sampai sekarang. Penempatan petugas Penyuluh atau Koordinator Penyuluh yang cakap dan memahami TI (Teknologi Informasi) atau TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) merupakan suatu hal yang cukup penting agar penyediaan

## Lanjutan Berita Bimtek Cyber Extension...



Narasumber sedang memberikan materi tentang Cyber Extension

informasi melalui situs web dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan program penyuluhan.

Ketersediaan Bahan materi Penyuluhan dan informasi Penyuluh dalam kementerian Pertanian dan BDDSDMP lembaga seperti BP4K tidak lepas dari hasil kerjasama erat antara penyedia materi (informasi), pengumpul dan pemberi data materi penyuluhan (tema) dan petugas pengelola CybEx (Admin CyBex).

Pembagian tugasnya sudah cukup jelas, Penyuluh berbekal TIK atau Berbasis Aplikasi Multimedia Website, membuat tampilan yang baik menampilkan informasi sesuai objek materi penyuluhannya berasal dari BP4K (Kabupaten) atau BP3K (BPP/kecamatan), Penyuluh atau Pengalaman Keberhasilan Suatu Petani binaannya. mengumpulkan, berkoordinasi dengan penyuluh lain agar penyediaan informasi penyuluhan bisa mutakhir dan berkesinambungan. Kegiatan bimtek untuk para petugas penyuluh petugas pengelola CybEx (Admin) ini dilaksanakan untuk berbagi, belajar bersama dan memahami lebih mendalam aturan - aturan baku pembuatan dan pengelolaan sajian multimedia berbasis TIK dan menggunakan piranti lunak Aplikasi Multimedia yang kemungkinan hasilnya akan dapat di upload pada suatu situs agar lebih efektif efisien, menarik, aman, akuntabel, responsif estetik, dan informatif sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan dibidang TIK.

Materi yang diberikan diawali dengan pemaparan tentang Adobe Photoshop CS3, cara instalasi. Dilanjutkan mulai dari **Pengenalan Adobe Photoshop, Pengenalan Layer, Pengenalan Toolbox, Pengertian Header atau Banner dan**

**Latihan Pembuatan Header** dan dilanjutkan praktek dengan cara sederhana menggunakan alat perekam gambar, video paling sederhana seperti pemanfaatan kamera, HP, menyimpan dan memindahkan hasil rekaman ke media komputer, membuka file hasil rekaman, menyusun dan mengemas menjadi satu cerita dalam bentuk sajian video, serta mengajak dan mengingatkan untuk mengakses dan mengikuti apa yang ada dan telah disajikan (konten) pada portal **CybEx**, diantaranya bisa mengetahui perkembangan terkini pada portal yang harus dapat diikutidengan segera, sebagai dengan adanya CybEx maka dengan cepat akan dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan yang ada, contoh misalnya;

1. Perpres No. 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
2. Views Peraturan Menteri, diantaranya;
  - Permentan No. 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
  - Permentan No. 2 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
  - Permentan No. 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan
  - Permentan Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani
  - Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 43 Tahun 2013 Tentang SKKNI  
Lampiran  
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013  
Tentang  
Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis Golongan Penyuluhan Sub Golongan Penyuluhan Pertanian Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

## Lanjutan Berita Bimtek Cyber Extension...



**Peserta sedang mengikuti  
Bimtek Cyber Extension**

- Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/4/2013 Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian
- Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011 Tentang Mekanisme Tata Hubungan Kerja Dalam Mendukung P2BN
- Peraturan Bersama Mentan dan Kepala BKN No. 54 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
- Permentan Nomor : 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta

Adanya Pedoman;

- Surat Pemberitahuan Tentang Format Identifikasi Pos Penyuluhan Desa
- Pengumuman Nominasi Calon Pemenang Penulisan Karya Tulis Ilmiah Terbaik Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Tahun 2012 Surat Pemberitahuan Tentang Pameran dan Promosi Pertanian Pada Acara Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluhan Pertanian 2012
- Panduan dan Daftar Hadir Peserta Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluhan Pertanian Tahun 2012
- Panduan Operasional Penyelenggaraan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani
- Format Laporan UKP4 Pemberdayaan Petani Melalui Denfarm Padi
- Pedoman Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm Padi
- Pedoman Pelaksanaan SL Agribisnis Tahun 2012

- Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP Bagi THL - TB
  - Pedoman Honor THL - TBPP 2011
  - Pedoman Monev Dekon 2011
  - Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)
  - Pedoman Umum Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Tahun 2009
- Adanya Juklak, seperti;

- Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Diluar Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai
- Juklak Pemberdayaan Petani Melalui Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Disentra Produksi Tebu, Sapi dan Hortikultura
- Peraturan Kepala BPPSDMP Nomor : 32/Per/OT.140/J/05/13 Tentang : Juklak Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian
- Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2012
- Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani
- Kerja sama » Petunjuk Pelaksanaan/Panduan Umum

Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini merupakan pedoman kerja dalam melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian, dapat digunakan oleh unit kerja/UPT Badan Litbang Pertanian, maupun sebagai acuan pihak Mitra kerjasama.

Adanya Juknis;

- Petunjuk Teknis Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian
  - Petunjuk Teknis Supervisi, Monev dan Pelaporan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
- Masih ada konten lainnya adalah terkait dengan MATERI PENYULUHAN dan MATERI SPESIFIK LOKALITA, isi portal CybEx sangat cocok untuk diimplementasikan dilingkungan para penyuluh di Kabupaten Sukabumi, bahkan menjadi media yang

## Lanjutan Berita Evaluasi Kegiatan Pusdatin...



**Narasumber dan Peserta sedang melakukan diskusi**

lebih informatif lagi bagi masyarakat luas, yang wilayahnya luas dan banyak karakteristik serta memiliki banyak keunggulan, maka dengan

pemanfaatan CyBex akan mempercepat sampainya informasi pertanian dan materi penyuluhan dari Sabang sampai Merauke dan penyampaian informasi melalui CyBex menggunakan akses internet di lingkungan BDSMP dan pada Kementerian Pertanian umumnya sudah diimplementasikan dan telah dikembangkan. Mungkin ada beberapa kendala yang dijumpai pada implementasi CyBex ini diantaranya keterbatasan SDM, bentuk kelembagaan pengelola yang bervariasi antar daerah dan mungkin masih diplrkan adanya dukungan kebijakan. (Asth)

## PELAKSANAAN IMPLEMENTASI DAN PENGAWALAN e-FORM PETERNAKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA



**Peserta Implementasi e-Form Nak sedang mengerjakan Pre Test**

Pengembangan e-Form Peternakan telah dilakukan sejak tahun 2007, hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai kendala keterlambatan pelaporan data dari daerah ke pusat. Kendala utama adalah belum seragamnya metode pengumpulan data peternakan, baik pedoman maupun formulirnya. Beberapa kendala lain yang dijumpai diantaranya keterbatasan SDM, bentuk kelembagaan pengelola data peternakan yang bervariasi antar daerah dan lemahnya dukungan kebijakan. Selain itu beberapa kebijakan seperti telah terbitnya Peraturan pemerintah No 47 tahun 2007, menyebabkan bentuk kelembagaan khusus yang menangani data statistik peternakan di daerah tidak tersedia, sehingga manajemen penanganan data cenderung mengalami hambatan.

Selama tujuh tahun terakhir (2007 – 2013),

uji coba e-Form Peternakan telah dilakukan di 20 provinsi meliputi Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Bersamaan dengan pelaksanaan uji coba, juga dilakukan penyempurnaan program e-form peternakan dengan mempertimbangkan masukan dari provinsi lokasi uji coba, tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi di lapang. Selain itu pada tahun 2012 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan SK No. 798/Kpts/OT.040/F/11/2012 tentang "Petunjuk Teknis Pengumpulan Dan Penyajian Data Peternakan". Secara paralel penyempurnaan program e-Form peternakan terus dilakukan berkoordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pengguna utama.

Menindaklanjuti SK tersebut, maka Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2014 akan melanjutkan melaksanakan implementasi kepada 16 provinsi yang sebagian belum pernah dilatih di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa provinsi baru meliputi Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan

## Lanjutan Berita Pelaksanaan Implementasi e-Form Nak...



**Peserta Implementasi e-Form Nak sedang mengerjakan Post Test**

Bangka Belitung, DKI, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut, formulir yang harus dilaporkan oleh petugas pengelola data peternakan di kabupaten/kota sebanyak 4 (empat) formulir, yaitu :

- 1) Formulir NAK01, berisi data populasi ternak dan periode pengumpulan data tahunan.
- 2) Formulir NAK02, berisi data pemotongan ternak yang tercatat/dilaporkan di RPH/Tempat Pemotongan Lainnya/RPU maupun di luar RPH/TPH/TPA/TPU yang tidak dilaporkan (pemotongan tidak tercatat). Periode pengumpulan data bulanan.
- 3) Formulir NAK03, berisi data pemasukan ternak, baik pemasukan antar kabupaten/kota, antar provinsi maupun antar negara. Periode pengumpulan data bulanan.
- 4) Formulir NAK04, berisi data pengeluaran ternak, baik pengeluaran antar kabupaten/kota, antar provinsi maupun antar negara. Periode pengumpulan data bulanan.

Cakupan wilayah terkecil dari pengumpulan data adalah kecamatan, namun untuk memudahkan proses pengumpulan di wilayah desa disediakan Formulir Bantu Desa. Cakupan komoditas adalah 15 komoditas, terdiri atas kerbau, sapi potong, sapi perah, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, burung puyuh, burung merpati, kelinci, itik dan itik manila.

Pada tahun 2011, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerja sama dengan BPS telah melaksanakan kegiatan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau atau dikenal dengan PSPK 2011. Kegiatan PSPK 2011 diselenggarakan untuk

mendukung Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Nasional/PSDSK tahun 2014, bertujuan untuk mendapatkan data populasi ketiga ternak besar tersebut. Pembaruan data hasil PSPK2011 dilakukan di tahun 2013, seiring dengan pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 (ST 2013 oleh BPS).

Tujuan Kegiatan Implementasi dan Pengawasan e-Form Peternakan adalah memberikan pemahaman yang sama kepada petugas pengelola data peternakan di 16 provinsi dan 227 kabupaten/kota mengenai petunjuk teknis pengumpulan data peternakan dan operasional aplikasi e-Form peternakan.

Pelaksanaan Implementasi dan Pengawasan e-Form Peternakan di Provinsi DKI telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2014, bertempat di Hotel New Ayuda, Jl. Raya Cipayung, Bogor. Peserta pelatihan adalah seluruh petugas pengelola data peternakan di kabupaten/kota dan provinsi sebanyak 8 orang, meliputi 6 orang petugas kabupaten/kota (Provinsi DKI Jakarta terdiri atas enam kabupaten/kota), dan dua orang petugas provinsi.

Keterlibatan petugas kabupaten dan provinsi sesuai dengan peran masing - masing. Petugas provinsi bertugas untuk (1) melakukan rekapitulasi data peternakan dari kabupaten/kota dan melaporkannya ke tingkat pusat, (2) monitoring absensi pelaporan data dari petugas kabupaten/kota ke pusat melalui e-Form sekaligus (3) melakukan supervisi terhadap proses pelaporan data di lapang. Petugas kabupaten bertugas untuk (1) melakukan pengumpulan, rekapitulasi data kecamatan dan pelaporan data ke tingkat provinsi dan ke tingkat pusat, (2) melakukan rekapitulasi, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan dari kecamatan untuk tingkat kabupaten/kota serta (3) melakukan supervisi ke Mantri Hewan/petugas lapang dalam melaksanakan pengumpulan data serta pengisian formulir.

Materi yang disampaikan mencakup review pedoman pengumpulan data peternakan berupa penjelasan mengenai (1) tata cara melakukan rekapitulasi serta pengisian kuesioner, (2) aplikasi e-Form Peternakan, dan (3) uji coba pengisian

## Lanjutan Berita Pelaksanaan Implementasi e-Form Nak...



Peserta Implementasi  
e-Form Nak

formulir sampai dengan pengiriman ke server pusat.

Pelaksanaan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang sekaligus membuka acara, dan Kepala Seksi Data Peternakan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI yaitu Ir. Erwin Fahry, MM, mewakili Kepala Dinas yang berhalangan hadir. Kapusdatin memberikan pengarahan mengenai pentingnya keakuratan data yang dilaporkan oleh petugas dan harus tepat waktu, karena kalau waktu pelaporan tidak tepat maka data akan menjadi kurang bermanfaat.

Sebelum masuk pada materi, diawali dengan pre test yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petugas terhadap materi yang akan disampaikan. Selanjutnya penyampaian materi sosialisasi menggunakan metode dua arah, sehingga ada interaksi aktif berupa forum tanya jawab/diskusi antara instruktur dengan peserta, demikian juga sebaliknya. Pada saat pelaksanaan peserta cukup aktif bertanya, beberapa pertanyaan disertai tanggapan diantaranya adalah :

- Untuk ternak masuk di Provinsi Jakarta biasanya dipotong di luar Jakarta selanjutnya masuk ke Jakarta dalam bentuk daging, apakah seperti kasus ini perlu di masukkan pada E Form.?
- Tanggapan: Tidak perlu dicatat karena ternak masuk yang dicatat adalah yang ternak masih hidup dalam satuan ekor. Ternak tersebut sudah dicatat di provinsi asal sebagai pemotongan ternak.
- Pemotongan ternak baik itu di RPH dan RPU ataupun di tempat pemotongan lainnya lebih banyak jumlah ternak yang dipotong tidak dilaporkan dan tanpa dimembayar retribusi, bagaimana cara input di Form nya?

- Tanggapan: Semua pemotongan yang tidak dilaporkan/tercatat serta tidak ada retribusinya dimasukkan ke dalam kolom pemotongan tidak tercatat.
- Budidaya ternak unggas di Provinsi DKI Jakarta telah dikenai/diterapkan Perda tentang dilarangnya ternak unggas, namun masih sering dijumpai banyak ternak unggas di wilayah pemukiman, apakah harus dimasukkan di e-Form?
- Tanggapan: Apabila tidak ada datanya tidak perlu dicatat di e-Form. Namun sebagai masukan, sebaiknya populasi unggas tetap dipantau, untukantisipasi jika terjadi wabah Flu Burung maka akan lebih mudah mengantisipasi penanganannya.
- Banyak sapi bakalan potong yang datang dari luar wilayah DKI, diinapkan di RPH sekitar 2 (dua) minggu sampai 2 (dua) bulan, apakah dicatat sebagai populasi?
- Tanggapan: Tidak, ternak yang masuk untuk dipotong dimasukkan dalam formulir/laporan sebagai pemasukan ternak. Setelah dipotong dilaporkan sebagai pemotongan ternak, sehingga dalam dinamika populasi datanya akan seimbang. Seandainya ada sisa ternak hidup yang tidak dipotong dalam kurun waktu tertentu maka otomatis akan masuk/dihitung sebagai populasi.

Setelah penyampaian materi selesai, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi melalui post test yang mencakup pengisian formulir laporan (*Role Play*). Peserta juga diwajibkan melakukan uji coba input data ke dalam aplikasi e-Form Peternakan dan mengirimkannya ke server Pusdatin secara on line maupun off line.

Acara Bimtek ditutup oleh Narasumber dari Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan mengingatkan kepada petugas supaya secara rutin mengirimkan formulir laporan. Seandainya dalam proses pelaporan ditemui permasalahan, petugas dipersilakan untuk menghubungi Tim Bimtek e-Form Peternakan dari Pusdatin, baik melalui telepon maupun email.

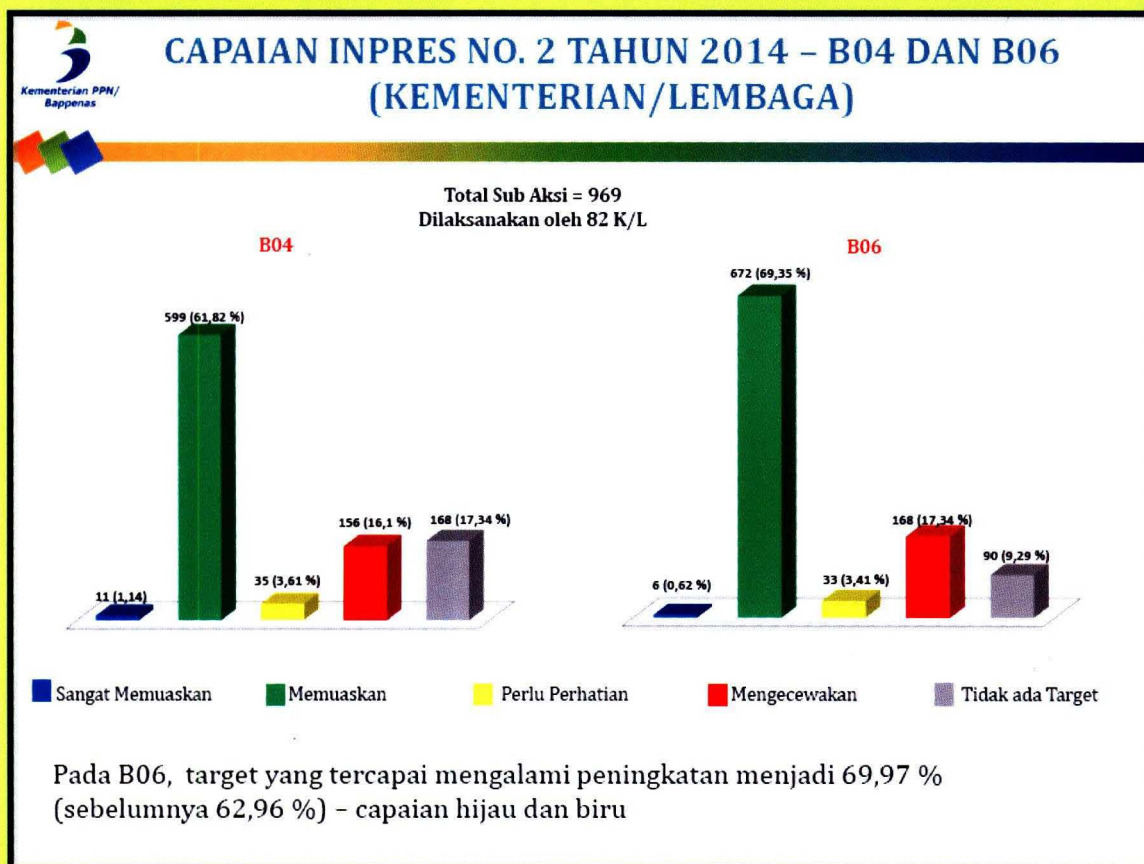
(*Irin*)

# STANDARISASI LPSE

## KEMENTERIAN DAN LEMBAGA OLEH LKPP

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengundang LPSE Kementerian dan Lembaga melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014. LKPP mengundang enam puluh delapan LPSE Kementerian dan Lembaga Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014 di Hotel Bidakara – Jakarta.

Paparan yang diberikan oleh LKPP adalah data yang diberikan oleh Bappenas dari capaian Inpres No.2 tahun 2014 untuk B04 dan B06. Pada B06 target yang tercapai mengalami peningkatan menjadi 69,97% dari 62,96% untuk capaian hijau (memuaskan) dan biru (sangat memuaskan). Capaian ini dilaksanakan oleh 82 kementerian dan lembaga dengan jumlah total sub aksi sebanyak 969 aksi. Meskipun begitu, masih ada kementerian dan lembaga yang masuk ke dalam capaian kuning (perlu perhatian), merah (mengecewakan), dan abu - abu (tidak ada target) seperti yang terlihat dari gambar 1.

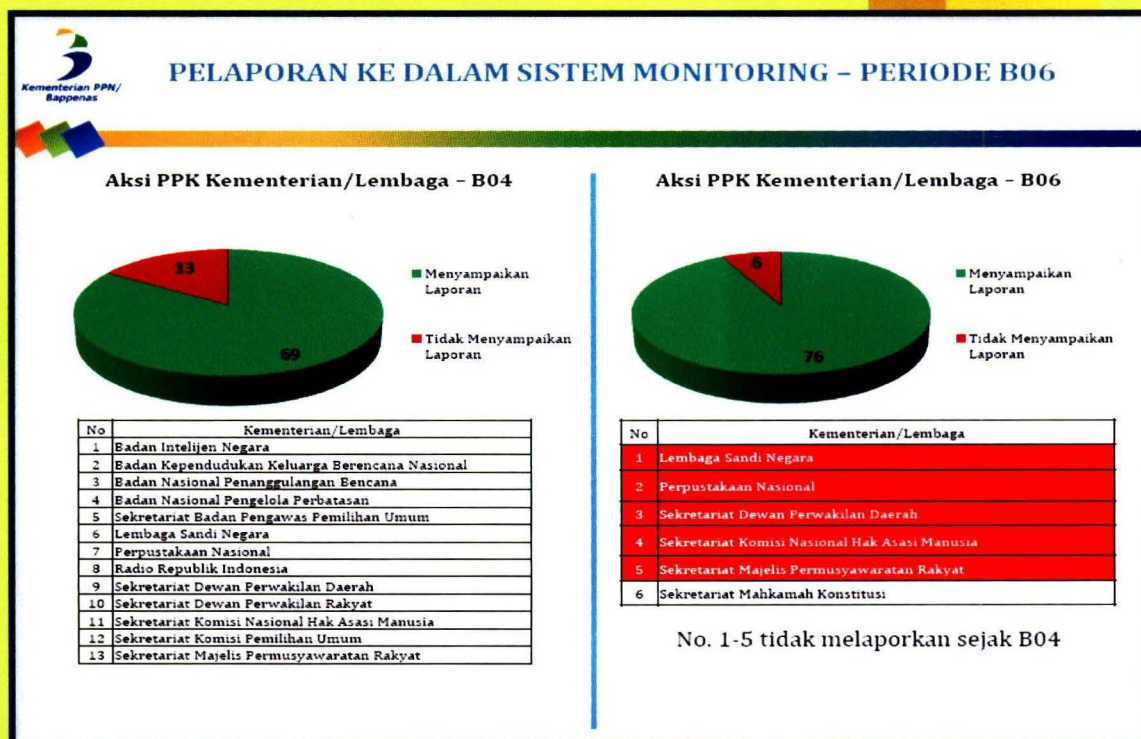


**Gambar 1. Capaian Inpres No. 2 Tahun 2014 Kementerian dan Lembaga Untuk Laporan B04 dan B06**

Pada pelaporan ke dalam sistem monitoring dari tiap kementerian dan lembaga pada periode B04 aksi PPK kementerian dan lembaga yang sudah menyampaikan laporan sebanyak 13 kementerian dan lembaga dan yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 69 kementerian dan lembaga dari jumlah total 82 kementerian dan lembaga. Tiga belas kementerian dan lembaga yang memasukkan aksi PPK ke dalam sistem monitoring adalah Badan Intelijen Negara, Badan

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lembaga Sandi Negara, Perpustakaan Nasional, Radio Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat.

# Lanjutan Berita Standarisasi LPSE...



Gambar 2. Pelaporan Aksi PPK B04 dan B06

Sedangkan aksi PPK kementerian dan lembaga periode B06 dari 82 kementerian dan lembaga yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 6 kementerian dan lembaga yaitu Lembaga Sandi negara, Perpustakaan Nasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Sekretariat

Mahkamah Konstitusi. Dari 6 kementerian dan lembaga yang tidak menyampaikan laporan, kecuali Sekretariat Mahkamah Konstitusi tidak menyampaikan laporan sejak periode B04.


Pada acara bimbingan teknis standarisasi LPSE kementerian dan lembaga ini pun diperlihatkan rekapitulasi capaian inpres no.2 tahun 2014 tahun 2014 hingga periode B06.

No	Kementerian/Lembaga	Merah	Kuning	Hijau	Biru	Abu	Grand Total	Keterangan
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	3	1	3			7	
2	Badan Informasi Geospasial (BIG)	6		2			8	
3	Badan Intelijen Negara (BIN)	2		5			7	
4	Badan Kepegawaian Negara	3		12		2	17	
5	Badan Kependudukan Keluarga Berencana nasional (BKKBN)	1		7			8	
6	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)			9			9	
7	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	1		8			9	
8	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1	1	6		1	9	
9	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	6		2			8	
10	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)			1	7		8	
11	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2	1	5			8	
12	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	6		4	12	
13	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)			9			9	
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5	1	3		1	10	
15	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	5	1	5		1	12	
16	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	2	1	7			10	
17	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi			8			8	
18	Badan Pertahanan Nasional (BPN)	5		10		4	19	
19	Badan Pusat Statistik (BPS)			11			11	
20	Badan SAR Nasional	5		3			8	
21	Badan Standarisasi Nasional			8			8	
22	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)			7			7	
23	Dewan Ketahanan Nasional			8			8	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	7					7	
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	2		5			7	
26	Keiaksaaan Agung		1	40	1	6	48	
27	Kementerian Agama	1	1	14		3	19	

Gambar 3. Rekapitulasi Capaian Inpres No. 2 Tahun 2014



## Lanjutan Berita Standarisasi LPSE...

 Lanjutan...

No	Kementerian/Lembaga	Merah	Kuning	Hijau	Biru	Abu	Grand Total	Keterangan
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)			10		1	11	
29	Kementerian Dalam Negeri			16		4	20	
30	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	5		10		5	20	
31	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	6	2	23		5	36	
32	Kementerian Kehutanan	1		9	1	5	16	
33	Kementerian Kelautan dan Perikanan			11			11	
34	Kementerian Kesehatan			13	1	3	17	
35	Kementerian Keuangan			21		4	25	
36	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2	1	11			14	
37	Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat	3	2	2			7	
38	Kementerian Koordinator bidang Perekonomian	1		7			8	
39	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			7	1		8	
40	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2		8			10	
41	Kementerian Lingkungan Hidup			7			7	
42	Kementerian Luar Negeri			10			10	
43	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1	7			8	
44	Kementerian Pekerjaan Umum		2	9	1	7	19	
45	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1		7		3	11	
46	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7			7	
47	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	6		4			10	
48	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3	2	8			13	
49	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2		11		6	19	
50	Kementerian Perdagangan	1		9			10	
51	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas		2	9	1		12	
52	Kementerian Perhubungan			17		4	21	
53	Kementerian Perindustrian			7		1	8	
54	Kementerian Pertahanan			9			9	
55	Kementerian Pertanian		2	13		3	18	
56	Kementerian Perumahan Rakyat	7		3			10	
57	Kementerian Riset dan Teknologi			8			8	
58	Kementerian Sosial	1	3	5		3	12	
59	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi			12		1	13	
60	Kepolisian Republik Indonesia	1		44		5	50	
61	Sekretariat Komisi Informasi Pusat			1			1	
62	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	7					7	
63	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	9		4		1	14	
64	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2	2	4			8	
65	Lembaga Administrasi Negara	3		7			10	
66	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		1	6			7	
67	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)			7			7	
68	Lembaga Ketahanan Nasional			10			10	
69	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)			9			9	
70	Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban			1		1	2	
71	Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)	7					7	
72	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat	7					7	
73	Perpustakaan Nasional	9					9	
74	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan			12			12	
75	Radio Republik Indonesia	7		4			11	
76	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial			10			10	
77	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia	1	1	5		3	10	
78	Sekretariat Kabinet (SETKAB)			7			7	
79	Sekretariat Mahkamah Agung	4	2	6			12	
80	Sekretariat Mahkamah Konstitusi	7					7	
81	Sekretariat Negara (SETNEG)			7		3	10	
82	Televisi Republik Indonesia	5		8			13	
	Grand Total	168	33	672	6	90	969	

Gambar 4. Lanjutan Rekapitulasi Capaian Inpres No. 2 Tahun 2014

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaporan K/L yang dapat diidentifikasi melalui sistem monitoring adalah K/L tidak melaporkan klaim capaian ke dalam sistem monitoring, data dukung tidak sesuai dengan yang disepakati, data dukung belum sempurna, dan aksi belum dilaksanakan. Dari permasalahan tersebut, Bappenas akan melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki capaian ini yaitu,

- Memastikan agar K/L menyampaikan laporan capaian B09 dan memiliki rencana perbaikan kinerja dengan melakukan :
  - Pembahasan dan evaluasi dengan K/L terkait yang tidak melaporkan dan atau memiliki target capaian mengecewakan.
  - Untuk aksi generik, K/L pelaksana dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Untuk target yang belum tercapai di B04 dan

B06, dapat disampaikan pada B09 (namun tetap tidak akan merubah warna/capaian pada B04 dan B06).

- Bappenas akan melaporkan capaian B06 kepada Presiden dan Wakil Presiden.
- Bappenas akan menyampaikan capaian masing-masing K/L kepada pimpinan K/L.

Laporan aksi PPK periode B09 yang harus dilaporkan oleh LPSE adalah sertifikat standarisasi, daftar hadir pelatihan penyedia/rekanan dan foto-foto saat pelatihan tersebut dilaksanakan juga verifikasi perusahaan yang dilakukan oleh verifikator LPSE Kementerian Pertanian selama tahun 2014.

Pada tahun 2013, LPSE Kementerian Pertanian melakukan assessment standarisasi oleh LPSE Bangka yang ditunjuk oleh LKPP untuk melakukan hal tersebut. Tetapi dengan adanya peraturan baru, sertifikat standarisasi yang sudah

## Lanjutan Berita Sosialisasi Portal e-Publikasi...

dilakukan assessment pada tahun 2013 tidak dapat dikeluarkan dan harus melengkapi kembali persyaratan yang diberikan oleh LKPP untuk mendapatkan sertifikat standarisasi LPSE. Salah satu langkah yang diambil oleh LKPP untuk membantu laporan aksi PPK periode B09 yang terkait dengan LPSE adalah melakukan bimbingan teknis standarisasi yang diikuti oleh LPSE kementerian dan lembaga di Jakarta. Melalui bimbingan teknis ini

dipastikan setiap LPSE yang hadir akan mendapatkan minimal satu dari total tujuh belas sertifikat standarisasi yang dikeluarkan oleh LKPP. Sertifikat inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam sistem monitoring aksi PPK. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, LPSE Kementerian Pertanian mendapatkan dua sertifikat standarisasi yaitu sertifikat Standar Pengorganisasian Layanan dan Standar Kebijakan Layanan yang dapat dilaporkan kepada Bappenas.



Gambar 5. Sertifikat Standar Pengorganisasian Layanan



Gambar 6. Sertifikat Standar Kebijakan Layanan

Pada bimbingan teknis ini diberikan informasi form yang harus dilengkapi oleh LPSE agar memperoleh sertifikat standarisasi dan nantinya LPSE

harus melakukan assessment faktual yaitu LPSE yang ingin diberikan sertifikat dikunjungi langsung oleh tim penilai. (Lilik)



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

GD. D LANTAI IV - JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN - JAKARTA SELATAN 12550

TELEPON : (021) 7822638, 7816384, FAKSIMILE (021) 7822638, 7816385

HOME PAGE: <http://www.pertanian.go.id> - Email : [pusdatin@pertanian.go.id](mailto:pusdatin@pertanian.go.id)

Nomor : 225/HM.100/A.7/12/2014  
Lampiran : 2 (dua) eksplar  
Perihal : **Publikasi Pertanian**

31 Desember 2014

Yth. :  
**(mohon lihat lampiran)**  
di-  
tempat

Bersama ini kami sampaikan publikasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian berupa Newsletter Vol.11 No.118 bulan November dan No.119 bulan Desember Tahun 2014, semoga publikasi tersebut dapat dimanfaatkan dan disebarakan ke instansi yang memerlukannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data  
dan Sistem Informasi Pertanian

**M. Tassim Billah**  
NIP. 19570725 198203 1 002

**Tembusan :**  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (sebagai laporan)



	<b>DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA</b>
1	Direktur Jenderal Hortikultura
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
3	Direktur Perbenihan Hortikultura
4	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Buah
5	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat
6	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Florikultura
7	Direktur Perlindungan Hortikultura
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
1	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Direktur Perbibitan Ternak
4	Direktur Pakan Ternak
5	Direktur Budidaya Ternak
6	Direktur Kesehatan Hewan
7	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN</b>
1	Direktur Jenderal Perkebunan
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan
3	Direktur Budidaya Tanaman Tahunan
4	Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
5	Direktur Perlindungan Perkebunan
6	Direktur Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
7	Direktur Tanaman Semusim
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b>
1	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3	Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan
4	Direktur Pengelolaan Air Irigasi
5	Direktur Pembiayaan Pertanian
6	Direktur Pupuk dan Pestisida
7	Direktur Alat dan Mesin Pertanian
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</b>
1	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
3	Direktur Mutu dan Standardisasi
4	Direktur Pengolahan Hasil Pertanian
5	Direktur Pemasaran Domestik
6	Direktur Pemasaran Internasional
7	Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi

